



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/ 82 /2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Isntansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0063);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA, UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat;
2. Bupati adalah Bupati Sumba Barat;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
6. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
7. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat;
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1). Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2). IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1). Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU;
- (2). IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3). Format IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi penetapan kinerja.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1). Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021;
- (2). Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- (3). IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4). Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1). Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2). Pengawasan atas Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan.


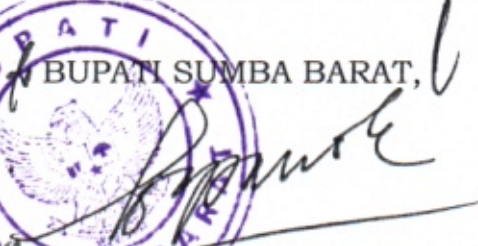
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 12 September 2017


BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 12 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,


UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 8.a

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SUMBA BARAT
 TAHUN 2016 - 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG	SUMBER DATA	SATUAN	FORMULA / KETERANGAN
MISI I : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG SEMAKIN MANDIRI, MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT YANG BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DENGAN PEMANFAATAN RUANG SECARA OPTIMAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.							
1	Meningkatnya pendapatan daerah dan pendapatan perkapita masyarakat	1. Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	Laporan Keuangan	%	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
1		2. PDRB perkapita	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	Laporan Keuangan	%	$\frac{\text{PDRB tahun ke n} - \text{PDRB tahun n-1}}{100\%} \times \text{PDRB tahun n-1}$
1		3. Laju pertumbuhan ekonomi	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	Laporan Keuangan	%	$\frac{\text{PDRB tahun ke n} - \text{PDRB tahun n-1}}{100\%} \times \text{PDRB tahun n-1}$
1		4. Pendapatan perkapita masyarakat	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	Laporan Keuangan	Rp	$\frac{\text{Pendapatan regional neto}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$

1	1	2	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah	1. Produktivitas komoditi pertanian unggulan seperti padi, jagung, ubi ubian dan kacang - kacangan 2. Produktivitas komoditi perkebunan unggulan seperti kopi, kakao, kelapa, kemiri, cengkeh 3. Jumlah populasi ternak besar dan kecil 4. Produksi perikanan tangkap	Pertanian	Dinas Pertanian	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Kw / ton	Produksi komoditi pertanian X 100% Luasan areal tanam Produksi komoditi perkebunan X 100% Luasan areal tanam Jumlah populasi ternak (ekor) Produksi tangkapan ikan (ton)
1	1	3	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	1. Pengeluaran konsumsi RT per kapita sebulan menurut kelompok barang makanan 2. Pengeluaran konsumsi Rumah tangga perkapita (angka konsumsi RT per kapita) 3. Nilai Tukar Petani	Pertanian	Dinas Pangan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Rp	Jumlah Rupiah yang dibelanjakan
1	1	4	Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan perdagangan yang berorientasi pasar	1. Persentase koperasi aktif (%)	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	%	Harga komoditas yang dijual petani X 100% Harga komoditas yang dibeli petani Jumlah koperasi / UKM aktif X 100% Jumlah keseluruhan koperasi / UKM
1	1	5	Meningkatnya jumlah pasar tradisional dan sarana penunjangnya	1. Ketersediaan pasar desa dan toko/kios	Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Unit	Jumlah unit pasar desa / lokal
1	1	6	Meningkatnya investasi dan penanaman modal	1. Jumlah investor PMDN 2. Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) (juta) 3. Rasio daya serap tenaga kerja	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	investor Rp %	Jumlah investor Jumlah nilai Rupiah investasi Jumlah tenaga kerja terserap X 100% Jumlah kebutuhan tenaga kerja Jumlah penduduk yang bekerja X 100% Jumlah penduduk
1	1	7	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	1. Rasio penduduk yang bekerja 2. Jumlah pencari kerja terdaftar 3. Tingkat partisipasi angkatan kerja 4. Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	%	Jumlah orang pencari kerja terdaftar Jumlah angkatan kerja X 100% Jumlah penduduk usia kerja Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN
1	2	1	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan manca negara	1. Jumlah kunjungan wisatawan domestik 2. Jumlah kunjungan wisatawan manca negara	Pariwisata	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Orang % Orang	Jumlah wisatawan domestik Jumlah wisatawan manca negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan	1. Jumlah penginapan / hotel yang memadai	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Penginapan / hotel	Jumlah penginapan / hotel yang memadai		
	1	2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur kepariwisataan	1. Jumlah pelaku jasa pariwisata yang dibina	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Pelaku jasa pariwisata	Jumlah pelaku jasa pariwisata yang dibina		
	1	2	Meningkatnya pembinaan seni budaya daerah	1. Frekuensi Penyelenggaraan festival seni dan budaya 2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Berapa kali diselenggarakan festival seni dan budaya	Berapa kali diselenggarakan festival seni dan budaya		
	1	3	1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah	1. Panjang jalan dilalui roda 4 (Km) 2. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam) 3. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 meter) 4. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Pekerjaan Umum	Laporan Hasil Survei dan atau Sensus	Jumlah Sarana	Berapa jumlah sarana pendukung seni dan budaya		
	1	3	2	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 2. Jumlah terminal bis	Pekerjaan Umum	Laporan Hasil Survei dan atau Sensus	Km	Panjang jalan		
	1	3	3	Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1. Jumlah Angkutan Orang 2. Jumlah Angkutan Barang	Pekerjaan Umum	Laporan Hasil Survei dan atau Sensus	Km	Panjang jalan		
	1	3	1	Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	1. Ketaatan terhadap RTRW 2. Luas wilayah produktif (ha) 3. Luas wilayah perkotaan (ha)	Penataan Ruang	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Capaian SPM Bidang Penataan Ruang	Perda	Jumlah Perda yang ditetapkan		
						Penataan Ruang	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Capaian SPM Bidang Penataan Ruang	Ha	Luas wilayah produktif		
						Penataan Ruang	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Capaian SPM Bidang Penataan Ruang	Ha	Luas wilayah perkotaan		

1	3	2	Meningkatnya penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1. Banyak Sertifikat yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah (Hak Milik) 2. Banyak Sertifikat yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah (HGB) 3. Banyak Sertifikat yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah (HGU) 4. Banyak Sertifikat yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah (Hak Pakai)	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Pertanian	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Capaian SPM Bidang Penataan Ruang	Sertifikat	Jumlah sertifikat yang diproses secara sah dan diterbitkan
1	3	3	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Jumlah sampah yang ditangani (%) 2. Jumlah Truk Sampah (unit)	Penataan Ruang Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Pertanian	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Capaian SPM Bidang Lingkungan Hidup	Sertifikat %	Jumlah sertifikat yang diproses secara sah dan diterbitkan Volume sampah yg ditangani X 100% Volume sampah keseluruhan
1	3	4	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	1. Jumlah Penduduk yang dilayani kegiatan pengangkutan sampah (jiwa)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Capaian SPM Bidang Lingkungan Hidup	Unit	Jumlah unit kendaraan pengangkut sampah
1	3	5	Meningkatnya penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Kualitas penanganan lingkungan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Capaian SPM Bidang Lingkungan Hidup	Jiwa %	Jumlah jiwa yang dilayani pengangkutan sampah Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ditata dan dikelola

MISI II : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG SEMAKIN DEMOKRATIS, MELALUI TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK, PENEKAKAN HUKUM DAN MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM Aparatur Sipil Negara	1. Persentase banyaknya ASN yang diberangkatkan mengikuti Diklat Struktural (Diklat Kepemimpinan) maupun Diklat Fungsional lainnya	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Database Kepegawaian	%	(Jumlah seluruh ASN yang ada + jumlah ASN yang belum mengikuti Diklat) x 100%			
2	1	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM Aparatur Sipil Negara	1. Hasil evaluasi SAKIP / LAKIP Pemerintah Daerah	Perencanaan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKT, PK)	AA / A / BB / B / CC / C / D	Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKT, PK)			
2	2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	2. Opini BPKP terhadap hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah	WTP / WDP	Laporan Keuangan Perangkat Daerah			
2	3	Meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah	1. Website milik pemerintah daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh Perangkat Daerah	Database E Government dan Web Resmi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	Jumlah Website	Tersedianya aplikasi E Government dan Web Resmi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang dapat diakses setiap saat oleh publik khususnya masyarakat Sumba Barat			
2	1	Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai - nilai budaya	1. Frekuensi penegakan PERDA	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bagian Hukum	PERDA / Perbup	Kali	Jumlah penegakan Perda atau Perbup pada masyarakat			
2	2	Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dan penegak hukum dalam mencegah dan menindak kejahatan dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat	1. Frekuensi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	kali	Jumlah berapa kali pembinaan dilaksanakan			

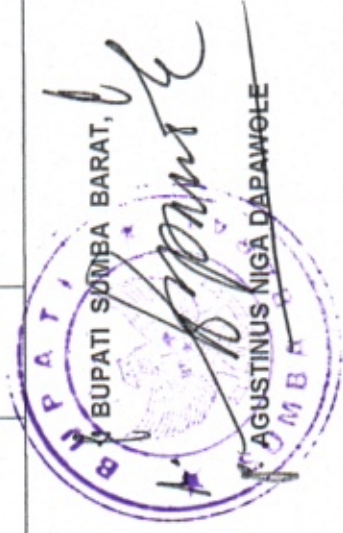
2	4	1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa	1. Jumlah PKK	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PKK	Jumlah PKK aktif
		2		2. Jumlah kelompok binaan PKK	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PKK	Jumlah kelompok binaan PKK
		3		3. Jumlah LSM	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	LSM	Jumlah LSM aktif
2	4	2	Meningkatnya kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan	1. Jumlah Desa Swadaya	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Desa	Jumlah Desa Swadaya
		2		2. Jumlah Desa Swakarsa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Desa	Jumlah Desa Swakarsa
2	5	1	Meningkatnya kolaborasi kemitraan yang sinergis antara pemerintah, swasta, NGO/LSM dan masyarakat	1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, Dokumen atau Memorandum Of Understanding	kali	Frekuensi pembinaan LSM dan Ormas
2	5	2	Meningkatnya kerjasama pembangunan dengan perguruan tinggi negeri/swasta dan lembaga-lembaga penelitian lainnya	1. Adanya dokumen atau Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemerintah Kabupaten dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan lembaga-lembaga penelitian lainnya	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, Dokumen atau Memorandum Of Understanding		Terlaksananya MOU

MISI III : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT.

3	1	Meningkatnya mutu dan pelayanan pendidikan Pra Sekolah (PAUD dan Taman Kanak-kanak)	1. Angka partisipasi pendidikan Pra Sekolah (PAUD dan Taman Kanak-kanak)	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	%	Jumlah anak lenlang PAUD / TK X 100%	X			
3	1	Meningkatnya mutu dan pelayanan pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 2. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	%	Angka putus sekolah	X			
3	1	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar 9 tahun	1. Persentase peningkatan angka partisipasi sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	%	Jumlah siswa sekolah dasar X 100% Anak usia sekolah 7-12 tahun	X			
3	1	Meningkatnya ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan	2. Rasio Guru / Murid SD / MI 1. Rasio Guru / Murid SD / MI 2. Rasio Guru / Murid SMP / MTs	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	%					
3	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan keaksaraan fungsional dan paket A, B dan C	1. Persentase angka melek huruf (%) 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	%	Peserta melek huruf X 100% Jumlah siswa keaksaraan paket A/B	X			
3	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus	1. Persentase jumlah guru terhadap murid berkebutuhan khusus	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan	%	Jumlah guru keaksaraan paket A X 100% Jumlah guru keaksaraan paket B X 100% Jumlah siswa SLB	X			
3	1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1. Persentase Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	%	Jumlah angkatan kerja produktif X 100%	X			
3	1	Meningkatnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga	1. Jumlah cabang olahraga 2. Lapangan olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Cabang Olahraga Lapangan Olahraga	Jumlah ojaran cabang olahraga				
3	2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	1. Rasio posyandu per satuan balita 2. Rasio puskesmas/poliklinik/pustu 3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 4. Rasio dokter per satuan penduduk	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Rasio	Jumlah posyandu Jumlah balita Jumlah puskesmas Jumlah pasien yang dilayani				

3	2	2	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	1. Angka Usia Harapan Hidup 2. Persentase balita gizi buruk (%)	Kesehatan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tahun %	Rata - rata angka usia harapan hidup terendah dan tertinggi Jumlah balita gizi buruk X 100% Jumlah balita			
3	2	3	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1. Rasio dokter per satuan penduduk 2. Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Kesehatan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Rasio Rasio	Per 1.000 penduduk Per 1.000 penduduk			
3	2	4	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir dan balita	1. Angka kematian ibu melahirkan 2. Angka kematian bayi baru lahir 3. Angka kematian balita	Kesehatan Kesehatan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jiwa Jiwa Jiwa	Per 1.000 jumlah ibu melahirkan Per 1.000 jumlah kelahiran bayi Per 1.000 balita (0 - 5 tahun)			
3	3	1	Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga, keluarga sejahtera, dan meningkatnya pelayanan keluarga berencana	1. Rasio akseptor KB 2. Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Capaian SPM Bidang Keluarga Berencana Laporan Capaian SPM Bidang Keluarga Berencana	Rasio	Per 1.000 keluarga Jumlah keluarga PS dan PSI X 100% Jumlah keseluruhan keluarga			
3	2	3	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan remaja	1. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT 2. Jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 3. Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Capaian SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Laporan Capaian SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Laporan Capaian SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Jiwa / Orang Kasus Kasus	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT Jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak			

3	3	3	Menurunnya jumlah kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak	1. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 2. Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Capaian SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Laporan Capaian SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Laporan Capaian SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kasus Kasus Kasus	Jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan
3	3	4	Meningkatnya pelayanan sosial, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya	1. Jumlah anak terlantar	Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Orang	Jumlah anak terlantar
3	4	1	Meningkatnya jumlah perumahan dan pemukiman layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah	1. Jumlah rumah tidak layak huni	Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Unit rumah	Jumlah rumah tidak layak huni
3	4	2	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat serta pengelolaan sumber daya air lainnya	1. Persentase penduduk berakses air minum	Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	%	Banyaknya penduduk miskin X 100% Jumlah keseluruhan penduduk
3	5	1	Meningkatnya pelayanan penerangan dan energi lainnya bagi masyarakat	1. Persentase desa teraliri listrik	Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bagian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bagian	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Desa / Kelurahan Kelurahan	Rumah tangga berakses air minum X 100% Jumlah keseluruhan rumah tangga Desa / kelurahan teraliri listrik



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/8.a/2017

TANGGAL : 12 September 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBA BARAT TAHUN 2016 - 2021.

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA ... (*nama PD*) KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR :/TAHUN

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN (*nama PD*) KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPALA (*nama PD*)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Bupati Sumba Barat Nomor ... Tahun 2017 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021, perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (*nama PD*);

Mengingat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (*nama PD*) TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (*nama PD*) KABUPATEN
SUMBA BARAT

KESATU : Indikator Kinerja Utama (*nama PD*) Kabupaten Sumba Barat,
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja
yang digunakan oleh (*nama PD*) Kabupaten Sumba Barat dalam
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana
kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis (Renstra) (*nama PD*) Kabupaten
Sumba Barat Tahun 2016-2021.


KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU Keputusan ini, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal,

KEPALA (nama PD)
Kabupaten Sumba Barat,

(Nama lengkap)



BUPATI SUMBA BARAT,
(Handwritten signature)
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP / HK / 8.a / 2017

TANGGAL : 12 September 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 - 2021

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA (Nama PD) TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (NAMA PD)
KABUPATEN SUMBA BARAT

Nama PD :
Tugas :
Fungsi : 1
2
3dst

No	Sasaran strategis		Indikator Kerja Utama PD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penaungjawab	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran Renstra PD	Sasaran RPJMD yang dipacu					

KEPALA PD
ttd
(Nama Lengkap dan titel)
(Pangkat/golongan)
(NIP.....)

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE